BERTAHAN PADA AACR2 ATAU BERALIH KE RDA?

Irkhamiyati
Pustakawan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta
Mahasiswa S2 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: irkham_ir@yahoo.com

Abstrak

Katalog perpustakaan berfungsi sebagai alat dalam temu kembali informasi. Pembuatan katalog berdasarkan pada aturan tertentu, yang bertujuan sebagai pedoman dan standarisasi katalog yang dimiliki. Perkembangan peraturan katalogisasi dari masa lalu, sampai ditemukannya aturan ISBD, AACR1, AACR2, dan RDA, memberikan segi plus dan minus. Peraturan mana yang akan dipilih perpustakaan, prinsipnya adalah untuk memberikan kemudahan, efektif, dan efisien baik bagi pemakai dan pengelola perpustakaan, baik bagi perpustakaan itu sendiri maupun bagi perpustakaan lain yang terjalin dalam sebuah jaringan kerja sama perpustakaan.

Keywords: katalog, katalogisasi, ISBD, AACR, RDA, temu kembali informasi.

I. Pengantar

Salah satu kegiatan pokok perpustakaan untuk mempermudah dalam pencarian koleksi adalah dengan pengelolaan koleksi melalui proses katalogisasi. Dalam sejarah kepustakawanan, katalogisasi merupakan keterampilan yang sudah berusia berabad-abad. Pembuatan katalog pertama kali hanya berfungsi sebagai senarai, kemudian fungsinya diperluas sebagai sarana untuk membantu mengetahui koleksi buku. Sulistya-Basuki, 1993: 315 berpendapat bahwa kehadiran teknologi informasi turut berdampak terhadap perkembangan fungsi katalog pada masa selanjutnya. Pengembangan fungsi katalog terus terjadi, hal ini sesuai dengan konsep *five law* dari Ranganathan bahwa *"library is a growing organism"*, perpustakaan memang sebuah organisasi yang terus mengalami perkembangan, termasuk dalam hal katalogisasi, mulai dari *British Museum Cataloging Rules* sampai dengan RDA. Bentuk katalog juga mengalami perubahan dari bentuk fisik sampai dengan bentuk elektronik. Kenyataan yang ada di perpustakaan akan aplikasi katalogisasi sangat beragam. Ada yang masih mempertahankan aturan AACR, ada juga yang sudah beralih menggunakan RDA.

B. Peraturan Katalogisasi

Proses pembuatan katalog disebut katalogisasi, meliputi: 1) Katalogisasi deskriptif, yang merekam data bibliografis (data fisik bahan pustaka), dan 2) Katalogisasi subjek, yaitu merekam subjek/isi bahan pustaka dengan cara menentukan subjeknya atau menentukan klasifikasi berdasarkan pedoman tertentu (Lasa Hs, 1997: 2).

Pengertian katalogisasi menurut Qalyubi, 2007: 130 berarti proses pengolahan data-data bibliografi yang terdapat dalam suatu bahan pustaka menjadi katalog. Istilah katalogisasi dalam orientasi pada pelayanan kepada pemustaka, diartikan sebagai proses pembuatan entri katalog sebagai sarana temu kembali informasi di perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam katalog perpustakaan, dicantumkan hal-hal penting yang diperkirakan akan digunakan untuk mencari suatu bahan pustaka dan informasi yang terkandung di dalamnya, baik mengenai fisik koleksi maupun isi bahan pustaka tersebut.

1. Fungsi Katalogisasi

   Lasa Hs, 1997: 2 menyebutkan bahwa fungsi katalogisasi adalah: 1) Untuk mencatat koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan/pusat informasi, 2) Untuk memudahkan pemakai dalam mencari dan menemukan kembali pustaka yang diinginkan, 3) Mengembangkan standar-standar bibliografi secara internasional.

2. Peraturan Katalogisasi dari Masa ke Masa

   Sebelum adanya upaya penyeragaman dalam membuat katalog perpustakaan, katalogisasi merupakan aktivitas perseorangan pada masing-masing perpustakaan. Perpustakaan membuat sendiri aturan katalogisasi yang dianggap paling cocok untuk kepentingan perpustakaannya, sehingga menjadikan bentuk dan gaya rekaman bibliografis berbeda antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan lainnya. Qalyubi, 2007: 134 mencatat perkembangan aturan katologisasi dari masa ke masa sebagai berikut:

   a. *British Museum Cataloguing Rules*

      *British Museum Cataloguing Rule*s karya Antonlo Panizzi dan kawan-kawan, menuliskan tentang peraturan katalogisasi yang berisi 91 aturan. Peraturan ini mencerminkan fungsi katalog sebagai sarana inventarisasi dan temu kembali dokumen di perpustakaan. Karya yang dibuat tahun 1893 ini digunakan sebagai pedoman klasifikasi di *British Museum*.

   b. *Rules for a Dictionary Catalogue*

      Charles Ammi Cutter dari Amerika yang menyusun *Rules for a Dictionary Catalogue* (1876). Karya ini memuat 369 peraturan yang mencakup: katalogisasi

deskriptif, tajuk subjek, dan penjajaran entri katalog.

c. Peraturan Jewett

Peraturan ini dibuat oleh Charles C. Jewett pada tahun 1853, yang berisi 33 peraturan, mencakup tajuk subjek dan praktik penentuan tajuk subjek. Ia menjadi pelopor katalogisasi terpusat yakni cara menyusun katalog induk dari berbagai perpustakaan.

Seiring dengan mulai dilakukannya kerjasama antar perpustakaan, pada abad ke-20 mulai ada usaha penyeragaman peraturan katalog dengan berdasarkan pada peraturan normatif, seperti contoh berikut ini.

1. AA 1908

   Usaha pengembangan katalogisasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh pustakawan Amerika dan pustakawan Inggris, dengan karyanya AA 1908. AA 1908 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan besar atas dasar ilmiah, sedangkan kebutuhan perpustakaan kecil tidak terlalu banyak disinggung.

2. Instruksi Prusia

   Semula Instruksi Prusia dikembangkan sebagai sistem baku katalogisasi untuk perpustakaan di Prusia, namun kemudian digunakan juga oleh perpustakaan di Belanda, Skandinavia, dan Jerman. Perbedaan peraturan Prusia dengan peraturan katalogisasi yang digunakan di negara Amerika dan Inggris, antara lain pada penentuan judul. Misal, pada buku berjudul *Introduction to Public Library*, berdasarkan Instruksi Prusia yang menjadi entri judul adalah *Public Library*, sementara menurut peraturan di Amerika dan Inggris, entri judulnya adalah *Introduction*. Sebab dalam penentuan judulnya, Intruksi Prusia menekankan pada tata bahasa, dan tidak terikat pada gramatikal judul sebagaimana peraturan di Amerika dan Inggris.

3. Kode Vatikan

   Kode Vatikan berisi peraturan yang berstruktur bagus mengenai entri, deskripsi, tajuk subjek, dan penjajaran entri katalog dengan disertai contoh. Kode Vatikan ini dibuat untuk menyusun katalog umum dari berbagai buku yang terdapat di Perpustakaan Vatikan.

4. ALA Draff (1941)

   Untuk merevisi aturan dalam AA 1908, di buatlah ALA Draff 1941. Draff ini memuat bagian entri dan tajuk, serta bagian deskripsi. Revisi terbanyak dari ALA Draff 1908 yakni dengan dihilangkannya peraturan pembentukan tajuk subjek.

5. *Library of Congress Cataloging Rules* (1949)

   Peraturan yang termuat dalam *Library of Congress Cataloging Rules* lebih disederhanakan, karena hanya mengatur tentang deskripsi, sedangkan penentuan tajuk ditiadakan. Peraturan tersebut mencakup berbagai jenis bahan pustaka, seperti monograf, terbitan berseri, peta, model timbul, globe,

atlas, musik, fotokopi, *mikrofilm*, dan inkunabula. Penyederhanaan dibuat tahun 1947 dan edisi akhirnya dibuat tahun 1949.

6. *American Library Association Rules* 1949

   Peraturan ALA 1949 hanya mencakup ketentuan tentang entri dan tajuk. Hal ini dikarenakan:

   a. Berbagai perpustakaan telah mengikuti praktik LC sebagai akibat dari penyebaran kartu katalog tercetak yang dilakukan oleh LC.
   b. Naskah ALA 1941 tidak memdapat sambutan dari pustakawan Amerika untuk ketentuan tentang deskripsi, digunakan bersama-sama dengan *Library of Congress Cataloguing Rules* karena di dalamnya memuat ketentuan tentang deskripsi.

7. *Anglo-American Cataloging Rules.*

   Suharyanto, 2013 menyebutkan perkembangan *Anglo-American Cataloguing Rules* (selanjutnya disingkat AACR) seperti uraian berikut ini. AACR merupakan peraturan pengatalogan untuk semua jenis bahan pustaka baik tercetak maupun noncetak. AACR terbit pertama kali pada tahun 1967 dikenal dengan AACR1. Prinsip umum peraturan tersebut didasarkan atas *"Statement of Principles"* yang disetujui oleh 53 Negara pada *International Conference on Cataloging Principles* di Paris tahun 1961.

   Tahun 1988 dilakukan revisi terhadap AACR1 sehingga terbitlah AACR edisi kedua yang lebih dikenal dengan AACR2, sebagai hasil kerjasama antara *American Library Association, Library Association* (Inggris), *Library of Congress*, dan *Canadian Library Association.* Pada tahun 2002 dilakukan revisi terhadap AACR2 dan terakhir pada tahun 2005 diterbitkan pemutakhiran terhadap AACR2 revisi 2002 dengan judul *"Anglo-American Cataloguing Rules Second Edition 2002 Revision 2005 Update"*.

   Kemunculan *Anglo-American Cataloging Rules* menyudahi penggunaan Peraturan ALA 1949 dan LC 1949 yang tadinya merupakan standar katalogisasi deskriptif bagi perpustakaan Amerika. Tiga organisasi pustakawan, yakni *American Library Association, Library Association*, serta *Canadian Library Association* merupakan organisasi yang bekerjasama dalam menerbitkan *Anglo-American Cataloging Rules*, yang kemudian dikenal dengan AACR 1 pada tahun 1967.

   Cikal bakal kemunculan AACR 1 ditandai dengan dilangsungkannya *International Conference on Cataloguing Rules* pada tahun 1961. Pertemuan tersebut merupakan langkah penting ke arah standardisasi data bibliografis Internasional. Pada konferensi Internasional tersebut, kemudian

menelurkan *"Statement of Principles"* yang disetujui oleh 53 negara. Dalam *"Statement of Principles"* tersebut memuat aturan mengenai pemilihan entri, bentuk tajuk, mendorong pembentukan tajuk badan korporasi, serta penyusunan judul berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

Kemudian sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman aturan pengatalogan, pada tahun 1978 terbitlah AACR 2 yang merupakan hasil dari kerjasama *American Library Association (ASO), Library Association, Canadian Library Association* serta *Library of Congress.*

8. *International Standard Bibliograpic Description (ISBD*)

Pada tahun 1971 kelompok kerja internasional yang ditugasi menyusun tata susunan dan isi deskripsi monograf, berhasil merumuskan deskripsi monograf yang dibukukan menjadi *International Standard Bibliograpic Description for Monograf* (ISBD-M).

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal, yakni (Qalyubi, 2007: 135) :

a. Agar informasi bibliografi yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam bahasa tertentu dapat dikenal dengan mudah oleh negara atau orang yang menggunakan bahasa lain.
b. Agar informasi yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat disatukan dengan informasi dari negara lain dalam satu jajaran.
c. Agar informasi dapat dibaca oleh mesin.

9. *RDA*

Gambaran tentang RDA banyak dikupas oleh pustakawan Perpusnas RI. Suharyanto, 2013 menyebutkan bahwa *Resource Description and Access* (RDA) adalah suatu standar pengatalogan baru yang dirancang untuk dunia digital dan dapat digunakan untuk deskripsi semua jenis sumber *(resources)*, *digital* maupun tradisional *(=non-digital)*. RDA dikembangakan berdasarkan landasan AACR2.

Tahun 2007 mulai dikembangkan penggunaan RDA. Tahun 2010 RDA mulai diterapkan oleh beberapa perpustakaan di AS, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Australia dan akan menyusul Jerman dan Perancis. Negara-negara lainnya di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, China masih dalam proses persiapan penerapan peraturan ini. Sedangkan di Indonesia baru pada tahap wacana dalam bentuk diskusi, seminar, *workshop*, dan lain sebagainya.

RDA diterbitkan tahun 2010 oleh *The American Library Association* (ISBN: 978-0-8389-1093-1), *The Canadian Library Association* (ISBN: 978-0-88802-335-3) dan *Clip: Chartered Institute of Library and Information Professionals* (ISBN: 978-185604-749-4). RDA versi cetak terdiri dari *RDA:*

Resources Desciption and Access (1096 hlm.) dan *RDA element set view: part 1 Attrib* (1288 hlm.) dan *part 2 Relationship* (384 hlm).

Susunan RDA terdiri dari tiga bagian utama *(American Library Association, 2010)* , 10 seksi, 37 bab ditambah beberapa lampiran untuk penggunaan huruf kapital, singkatan, kata sandang, penyajian data deskriptif dan data pengendalian titik temu), daftar istilah, dan *index*. Ketiga bagian utama adalah sebagai berikut:

Bagian I – *Resource Description* (termasuk sasaran fungsional & prinsip-prinsip deskripsi sumber informasi) meliputi seksi 1 s.d. 4.

Bagian II – *Relationships* atau hubungan (petunjuk umum tentang hubungan-hubungan, termasuk individu, keluarga, badan korporasi, yang punya hubungan dengan sumber; sitasi untuk karya berhubungan, dan petunjuk khusus untuk beberapa jenis karya tertentu) terdiri dari seksi 5 s.d 10.

Bagian III – *Access Point Control* (merumuskan titik akses/titik temu dan mencatat data yang digunakan dalam pengendalian titik temu) merupakan *RDA Appendices*.

Ketiga bagian utama ini dijabarkan lagi menjadi beberapa subbagian yang berisi aturan lebih rinci lagi. Susunan RDA juga dilengkapi apendik, glosarium dan indeks. Berikut pembagian berdasarkan sub bagian *(section)*:

Introduction
Section 1 : Recording attributes of manifestation and item (Chapter 1-4)
Section 2 : Recording attributes of work and xxpression (Chapter 5-7)
Section 3 : Recording attributes of person, family, and corporation body (Chapter 8-11)
Section 4 : Recording attribute of concept, object, event, and place (Chapter 12-16)
Section 5 : Recording primary relationships between work, expression, manifestation, and item (Chapter 17)
Section 6 : Recording relationships to persons, families, and corporate bodies associated with resource (Chapter 18-22)
Section 7 : Recording the subject of a work (Chapter 23)
Section 8 : Recording relationships between work, expression, manifestation, and item (Chapter 24-28)
Section 9 : Recording relationships to persons, families, and corporate bodies (Chapter 9-32) Section 10 : Recording relationships to concepts, object, event, and places (Chapter 33-37)
APPENDICES
GLOSARY
INDEX

Ada beberapa perbedaan cantuman bibliografis antara AACR2 dengan RDA, seperti pada contoh berikut ini:

No	Jenis Perbedaan	AACR 2	RDA
1	Terbitan	Terbit hanya dalam versi cetak	Terbit dalam versi cetak dan *online*
2	Pernyataan tanggung jawab, untuk pengarang lebih dari 3 orang	Ditulis pengarang yang disebut pertama kali diikuti dengan et al, contoh: Anis Masruri, et al.	Semua pengarang ditulis dalam daerah pernyataan tanggung jawab, contoh: Anis Masruri, Irkhamiyati, Lilik Purwanti.
3	Penulisan edisi	Ditulis menggunakan singkatan, contoh: 3rd rev.ed.	Ditulis apa adanya tanpa disingkat, contoh: *Third revised edition*
4	Deskripsi fisik: penulisan deskripsi fisik hlm & keterangan ilustrasi	Ditulis menggunakan singkatan, contoh: 199 hlm. ilus. 30 cm.	Ditulis apa adanya tanpa disingkat, contoh: 199 halaman: ilustrasi ; 30 cm.
5	Kota Terbit & Nama Penerbit yang tidak diketahui namanya	Kota Terbit ditulis dengan singkatan [s.l.] dan nama penerbit yang tidak diketahui ditulis dengan [s.n.] , contoh: [S.l. : s.n.], 2013.	Digantikan dengan istilah *[place of publication not identified]* & *[publisher not identified]* atau [tempat terbit tidak teridentifikasi] dan [penerbit tidak teridentifikasi], contoh: [Tempat terbit tidak teridentifikasi] : [penerbit tidak teridentifikasi], 2013.

No	Jenis Perbedaan	AACR 2	RDA
6	Penulisan untuk penomeran seri seperti: jilid, volume, dan nomor.	Dengan singkatan, contoh: Vol.7, No.3	Di RDA tidak lagi menggunakan singkatan tetapi ditulis apa adanya sesuai yang tertera pada sumber informasi utama. Contoh: Volumen 7, Nomer 3

Beberapa contoh perbedaan di atas, justru lebih memberi keleluasaan pencantuman data bibliografi. AACR yang dahulu umum diterapkan untuk katalog manual (kartu tercetak), tempat penulisan cantuman data bibliografisnya terbatas. Keterbatasan itu teratasi dengan munculnya RDA yang berbasis komputer memberi peluang penulisan cantuman data bibliografis secara lengkap. Contoh: jumlah pengarang yang lebih dari tiga bisa ditulis semua, bertujuan memberi kesempatan temu kembali informasi tidak hanya melalui satu pengarang saja. Penggunaan singkatan seperti nomor, volume, edisi, dll juga sangat dimungkinkan dengan lahirnya RDA, sehingga lebih efektif, efisien, dan memberi banyak peluang dan kemudahan. Hal ini diperkuat pendapat Risparyanto, 2012: 49 bahwa dalam katalogisasi berbasis komputer, semua informasi dikelompokkan berdasarkan metadata yang disimpan dalam sebuah *data base*, yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dengan demikian akan memudahkan proses temu kembali informasi untuk memperoleh hasil yang relevan (sesuai kebutuhan).

Menurut pendapat penulis, adanya perubahan aturan dalam katalogisasi, dari AACR 2 ke RDA, sebaiknya perpustakaan harus menentukan standar pengatalogan yang dipakai (menggunakan AACR 2 atau RDA), sehingga ada konsistensi dan keseragaman dalam pengelolaan bahan pustaka. Apabila perpustakaan akan mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain, maka perlu dipikirkan persyaratan metadata, sehingga OPAC antar perpustakaan bisa berfungsi untuk memudahkan temu kembali informasi.

Adapun bentuk tampilan katalog di OPAC, bisa bervariasi. Bisa saja bentuk tampilan katalog tetap menggunakan format seperti bentuk kartu katalog manual yang memuat data deskripsi bibliografi lengkap sesuai aturan. Bisa juga diformat menurut program otomasi yang digunakan atau sesuai dengan keinginan masing-masing perpustakaan. Apapun bentuk tampilan katalognya dalam OPAC, yang penting adalah memberikan data bibliografi yang berguna bagi pengguna dan pengelola perpustakaan.

C. Penutup

Perkembangan peraturan katalogisasi dari masa ke masa dimulai dari *British Museum Cataloguing Rules* sampai dengan munculnya ISBD, AACR2, dan RDA. Perpustakaan harus menentukan standart pengatalogan yang dipakai apakah tetap menggunakan AACR 2 atau RDA, sehingga ada konsistensi dan keseragaman dalam pengelolaan bahan pustaka. Terkait dengan peraturan apa yang akan digunakan apakah tetap menggunakan AACR 2 atau beralih ke RDA, termasuk bentuk katalog yang dipilih, prinsipnya adalah untuk memberi kemudahan, cepat, efektif dan efisiensi untuk proses temu kembali informasi.

D. Daftar Pustaka

American Library Association. (2010). Resouce Description Acess. Chicago: American Library Association .

Lasa Hs. (1997). Pedoman Katalogisasi Perpustakaan Muhammadiyah: Monograf dan Terbitan Berkala. Yogyakarta: Lukman.

Perpustakaan Nasional RI. (2009). Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009.

Qalyubi, Syihabuddin, dkk. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.

Risparyanto, Anton. (2012). Model-Model Temu Kembali Informasi *(Information Retrieval)*. Dalam UNILib Jurnal Perpustakaan, Vol.3, No.1, Tahun 2012. Yogyakarta: Perpustakaan UII.

Suharyanto. (2013). Indonesian Machine Readable Cataloging (Indo-MARC) : Sejarah, Perkembangan dan penerapannya di Perpustakaan Nasional RI. Diakses dari http://suharyanto1169.wordpress.com/

Suharyanto. From AACR2 to RDA : Implementation in National Library of Indonesia.https://www.academia.edu/535659/Perubahan_dari_AACR2_ke_RDA. Diakses pada Kamis, 26 Desember 2013 pukul 10.00.

Sulistyo-Basuki. (1993). Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sungadi, (2011). Katalog Perpustakaan (Masih Perlukan?). Diakses dari http://sungadi.staff.uii.ac.id/2011/12/28/katalog-kartu/. Diakses pada Kamis, 26 Desember 2013 pukul 11.00 WIB.